

## PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, LITERASI KEUANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KUALITAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Meylan Priska<sup>1</sup>, Usup Riassy Christa<sup>2</sup>, Fitria Husnatarina<sup>3</sup>, Danes Jaya Negara<sup>4</sup>, Roby Sambung<sup>5</sup>, Achmad Syamsudin<sup>6\*</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Palangka Raya

\*Corresponding: [meylan.msmupr@gmail.com](mailto:meylan.msmupr@gmail.com)

CHRONICLE	ABSTRACT
<p><i>Article History:</i> Received September 10, 2020 Revised October 2020, November 2020 Accepted Februari 5, 2021</p> <p><b>Keywords :</b> Budget Participation, Financial Literacy, Community Empowerment, APBdes Quality, Village Financial Management</p>	<p><i>Research in the field of management by strengthening financial literacy to strengthen the quality system of village income and expenditure budgets. Building a village with budget participation and community empowerment in the Gunung Mas district village apparatus in Palangka Raya Province. The research was conducted in seven sub-districts in Gunung Mas district, with 77 respondents being village officials. This type of quantitative research with the SPSS application shows that budget participation on the quality of APBdes is significant at 73%, then the results of financial literacy research are significant at 74%. The next result of community empowerment on the quality of APBdes is 59%. The implication of the results states that they can be used as a reference in improving the quality of APBdes and for further research to develop results with financial applications in village financial reports.</i></p>

### 1. Latar Belakang

Esensi dari Pembangunan Nasional adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk mencapai sasaran perumusan kebijakan pembangunan pedesaan perlu di adakan program yang semakin menekankan kontrol oleh masyarakat setempat serta manajemen sumber-sumber setempat (Mardiyatun, 2020). Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, merupakan UU tentang pengembalian tatanan mengenai jati diri desa yang dikembalikan lagi kepada asal-usulnya. UU ini juga menggambarkan itikad negara untuk memberikan kemandirian kepada pemerintah desa. Sehingga masyarakat desa disebut masyarakat yang mengatur diri sendiri, hal yang perlu diperhatikan desa merupakan tatanan pemerintah yang kecil disetiap daerah yang telah ada bahkan sebelum Indonesia ini terbentuk sebagai negara berdaulat. Reformasi ini mendorong proses reformasi berbasis daerah hirarki. Tujuannya untuk menciptakan pemerintah desa yang mampu menyejahterakan rakyat tatanan bawah. Desa yang merupakan produk era reformasi telah menandai dimulainya suatu era menuju kemandirian desa, baik dalam penyelenggaraan pemerintah maupun dalam pengelolaan keuangan desa (Iyan et al., 2020). Tujuan pembangunan desa sesuai pasal 78 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Wigreny et al., 2020). Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut (Hidajat, 2016). Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang

pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa (Sabtuti & Kristiana, 2020).

Sehingga perlu dilakukan peningkatan kualitas dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBdes) di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Dilihat dari fenomena yang terjadi di Kabupaten Gunung Mas ada beberapa desa yang masih kurang efisiensi dalam pengelolaan kualitas APBDes, di beberapa desa infrastruktur fisik belum memadai seperti jalan yang masih belum diaspal dan masih tanah merah struktur tanah yang masih rawa sehingga belum memenuhi standar tanah uruk selain itu seperti penghubung jalan yaitu jembatan yang belum dibangun dan juga ada beberapa desa yang masih belum mempunyai aliran listrik (Sumber: Bernadus, Kaur Pembangunan). Penelitian ini mengambil 7 desa yang ada di Kabupaten Gunung Mas dan objek penelitian ini berfokus pada aparatur desa. Penelitian ini memfokuskan pada Kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang juga di pengaruhi oleh beberapa hal yaitu seperti Partisipasi Anggaran dan Pemberdayaan Masyarakat. Hal ini penting dilakukan agar hasil penelitian dapat dijadikan sebagai evaluasi bagi pemerintah desa Kabupaten Gunung Mas dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Des

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1 Partisipasi anggaran

Partisipasi anggaran dalam penyusunan anggaran berarti keikutsertaan *operating manager* dengan komite anggaran mengenai rangkaian kegiatan di masa yang akan ditempuh oleh *operating managers* tersebut dalam pencapaian sasaran (Irfan *et al.*, 2016; Suartini *et al.*, 2020). Kualitas dari suatu anggaran pendapatan dan belanja desa diperuntuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan cara melakukan pembangunan infrastruktur desa dan melakukan program pemberdayaan masyarakat desa. Hanifah & Praptoyo, (2015), pertanggungjawaban dalam pengelolaan APBDes adalah pemerintah desa sehingga memiliki wewenang untuk mengatur keuangan desa, keberhasilan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa sangat ditentukan oleh dukungan dan peran serta semua pihak. Pengaruh partisipasi anggaran terhadap persepsi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas anggaran pendapatan dan belanja desa. Partisipasi anggaran adalah orang-orang atau kelompok yang berperan serta dalam penyusunan anggaran untuk mencapai tujuan anggaran (Winaya & Yudharta, 2018). Hal ini berpotensi mendorong semakin besarnya partisipasi anggaran yang ditunjukkan melalui peran aktif dan penyaluran aspirasi maka semakin besar persepsi masyarakat tentang kualitas anggaran pendapatan dan belanja desa (Artana *et al.*, 2015). Semakin tinggi partisipasi penyusunan anggaran maka akan berpengaruh juga terhadap senjangan anggaran pemerintah desa. Anggaran partisipasi mengarah kepada seberapa besar keterlibatan individu dalam menyusun anggaran serta pelaksanaannya untuk mencapai target anggaran. Kesempatan berpartisipasi dalam membuat anggaran di anggap oleh banyak orang dan organisasi sebagai perwujudan kebutuhan aktualisasi diri para anggota organisasi (Utomo, 2015) . Banyak juga pihak yang menyatakan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran merupakan suatu alat untuk mempertemukan penghargaan dan kebutuhan pengaktualisasian diri dari anggota-anggota organisasi.

### 2.2 Literasi keuangan

Literasi keuangan didefinisikan sebagai rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*competence*), keterampilan (*skill*) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan lebih baik (Hidajat, 2016). Literasi keuangan merupakan serangkaian pengetahuan keuangan yang berguna untuk meningkatkan keterampilan seseorang dalam mengelola

keuangan sehingga dapat terhindar dari masalah keuangan (Kisnawai *et al.*, 2019). Literasi keuangan yang cukup akan memberikan pengaruh positif terhadap perilaku keuangan seseorang, seperti mengatur atau mengalokasikan keuangannya dengan tepat. Kebanyakan pengalokasian dana ditujukan pada beberapa hal yaitu investasi, *saving*, dan konsumsi. Jenis pengalokasian yang paling memberikan manfaat di masa depan adalah investasi. Selain investasi, *saving* juga merupakan hal penting, karena *saving* merupakan salah satu cara untuk menyimpan dana yang digunakan ketika terjadi *force majeure*. Ramadhan (2018), menyatakan literasi keuangan didefinisikan sebagai pengetahuan dan pemahaman konsep keuangan, kemampuan, motivasi dan kepercayaan dalam mengaplikasikan beberapa pengetahuan dan pemahaman yang tertata dalam membuat keputusan efektif pada lingkup konteks keuangan untuk memperbaiki kesejahteraan keuangan masyarakat dan individu serta memungkinkan untuk ikut serta dalam kehidupan ekonomi (Hasanah, 2020).

## 2.2 Pemberdayaan masyarakat

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Permendagri No. 66 Tahun 2007 karakteristik pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif (Sabtuti & Kristiana, 2020). Pemberdayaan yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa. Menurut Hulu *et al.*, (2018) menyatakan, masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa dan oleh karena itu masyarakat harus menyadari perlunya memperoleh daya tahu kemampuan. Pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh besarnya serapan anggaran dana desa yang telah diperoleh. Dan masyarakat berkontribusi dalam meningkatkan pembangunan desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini didukung memberikan bukti bahwa, pemberdayaan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas anggaran pendapatan dan belanja desa (Maryani & Nainggolan, 2019).

Proses pemberdayaan menjelaskan bahwa proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagai kekuatan, kekuasaan, atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Kecenderungan pertama tersebut diartikan sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan kedua sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong, atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan keberdayaan untuk menekankan yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog (Endah, 2020).

## 2.3 Kualitas APBdes

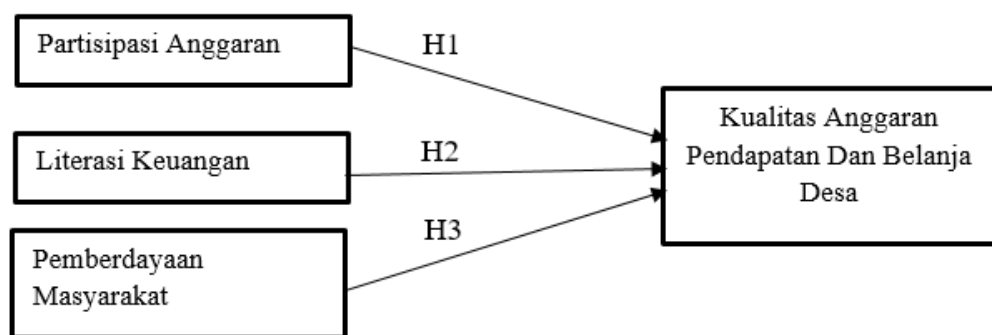
Kualitas dari suatu anggaran pendapatan dan belanja desa diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan cara melakukan pembangunan infrastruktur desa dan melakukan program pemberdayaan masyarakat desa (Winaya & Yudharta, 2018). Pertanggungjawaban dalam pengelolaan APBDes adalah pemerintah desa sehingga memiliki wewenang untuk mengatur keuangan desa, keberhasilan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa sangat ditentukan oleh dukungan dan peran serta semua pihak. Iyan *et al.*, (2020) menyatakan APBD merupakan daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/belanja daerah selama satu tahun

yang ditetapkan dengan peraturan daerah (perda) untuk masa satu tahun. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.

Anggaran menjadi suatu komponen penting dalam perencanaan dan pengendalian dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi sehingga seberapa baik pencapaian suatu tujuan organisasi akan bergantung pada kualitas anggarannya (Suartini *et al.*, 2020) Kualitas anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan proses penyusunan, penetapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa yang mengkedepankan pemenuhan prinsip keadilan, partisipasi, ekonomis, berbasis kinerja, akuntabilitas, dan disiplin anggaran serta menentukan skala prioritas dan operasional pembangunan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (Wigreny *et al.*, 2020).

#### 2.4 Kerangka konseptual dan hipotesis

Model penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 1. Model Penelitian**

Berdasarkan gambar model penelitian, maka hipotesis dalam penelitian adalah:

- H<sub>1</sub> = Partisipasi Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- H<sub>2</sub> = Literasi Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- H<sub>3</sub> = Pemberdayaan Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### 3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kuantitatif. Menurut Butarbutar *et al.*, (2020) metode kuantitatif merupakan suatu metode yang memfokuskan pada pemahaman fenomena sosial dari sudut pandang partisipasi secara deskriptif, dengan kata lain metode ini menekankan pada penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan sesuai fakta dilapangan yang kemudian di implementasikan berdasarkan teori-teori dan literatur-literatur (Prayitno *et al.*, 2020). Data yang digunakan dalam metode kuantitatif merupakan data primer berupa kuesioner yang nantinya akan dihitung secara statistik. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk mengaji pengaruh Partisipasi Anggaran, Literasi Keuangan dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Muharam & Sugiono, 2018). Populasi penelitian ini adalah aparatur desa di Kabupaten Gunung Mas. Dengan populasi sebanyak 77 aparatur desa untuk pengisian angket dari tujuh kecamatan. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Untuk menentukan ukuran besarnya sampel, peneliti menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

$n$  = Sampel

$N$  = Populasi

$N = 7$  Kecamatan  $\times$   $11 = 77$  responden

#### 4. Hasil Penelitian

Kabupaten Gunung Mas berada di provinsi Kalimantan Tengah dan merupakan salah satu kabupaten dari 13 kabupaten yang maju. Keberadaan aparatur desa di Kabupaten Gunung Mas adalah untuk meningkatkan pemberdayaan manajemen dalam organisasi desa yang bertujuan untuk memberikan kualitas anggaran pendapatan dan belanja desa secara terarah dan baik, untuk meningkatkan pemberdayaan desa. Salah satu kabupaten yang memiliki anggaran pendapatan dan belanja desa yang dapat di peroleh dari laporan keuangan di pengaruhi oleh partisipasi anggaran dari keahlian pengelolaan bagian keuangan desa. Berdasarkan data adanya kesenjangan antara besarnya anggaran desa yang terealisasi pada program adalah rata-rata 26,13%. Untuk pengujian dalam peningkatan kualitas dari peruntukkan pada program desa, diantaranya seperti: pengelolaan infrastruktur desa, program masyarakat berbasis kesehatan (imunisasi dan berobat gratis), program sunat masal, pembuatan akta lahir gratis dan lainnya. Dalam perubahan di butuhkan cara yang pendekatannya pada internal dengan kebijakan yang membutuhkan bukti, sebagai dasar perombakan system. Hal di maksud dilakukan dengan dorongan seperti dengan Partisipasi anggaran, Literasi keuangan dan cara Pemberdayaan masyarakat.

Pengujian awal dilihat dari hasil uji asumsi klasik yang termasuk uji validitas dan reliabilitas. Hasil membuktikan semua sudah memenuhi syarat statistic. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis dengan uji t dan f. hasil berikut. Berikut tabel hasil analisis hipotesis 1.

**Tabel 1. Pengaruh Partisipasi Anggaran (X1) terhadap Kualitas APBdes (Y)**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.289	.078		1.451	.000
Partisipasi anggaran (X1)	.731	.98	.642	2.871	.000

Sumber: authors, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat ditentukan model regresi linear sederhana yang dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut:  $Y = 0.289 + 0.642 X_1 + e$   
 Dari nilai persamaan regresi diatas dapat diketahui bahwa variabel bebas memiliki nilai koefisien regresi yang positif dan besarnya pengaruh partisipasi anggaran sebesar 0,642 atau 64,2 % memiliki pengaruh besar terhadap kualitas APBdes. Hal ini menunjukkan

bahwa bila variabel bebas tersebut ada yang mengalami perubahan (baik naik atau turun), maka variabel terikatnya juga akan berubah ke arah yang sama (naik atau turun).

Koefisien dari variabel partisipasi anggaran (X1) adalah signifikan pada  $\alpha = 0,05$ , karena karena  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$  ( $2.871 > 2.639$  atau nilai sig.  $0,00 < 0,05$ ). Artinya hipotesis 1 ( $H_1$ ) variabel partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas APBdes. Dengan demikian, hipotesis 1 yang menyatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kualitas APBdes diterima. Artinya Hal ini berpotensi mendorong semakin besarnya partisipasi anggaran yang ditunjukkan melalui peran aktif dan penyaluran aspirasi maka semakin besar kualitas anggaran pendapatan dan belanja desa. Hasil menunjukkan, bahwa semakin tinggi partisipasi penyusunan anggaran maka akan berpengaruh juga terhadap kualitas anggaran pemerintah desa.

Pengujian hipotesis 2, berikut tabel hasil pengujian pengaruhnya secara langsung:

**Tabel 2. Pengaruh Literasi Keuangan (X2) terhadap Kualitas APBdes (Y)**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.135	.102		3.124	.000
Literasi keuangan (X2)	.741	.95	.688	2.779	.000

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat ditentukan model regresi linear sederhana yang dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut:  $Y = 0.135 + 0.688 X2 + e$

Dari nilai persamaan regresi diatas dapat diketahui bahwa variabel bebas memiliki nilai koefisien regresi yang positif dan besarnya pengaruh literasi keuangan sebesar 0,688 atau 68,8 % memiliki pengaruh besar terhadap kualitas APBdes. Hal ini menunjukkan bahwa bila variabel bebas tersebut ada yang mengalami perubahan (baik naik atau turun), maka variabel terikatnya juga akan berubah ke arah yang sama (naik atau turun).

Koefisien dari variabel literasi keuangan (X2) adalah signifikan pada  $\alpha = 0,05$ , karena karena  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$  ( $2.779 > 2.639$ ) atau nilai sig.  $0,00 < 0,05$ . Artinya hipotesis 2 ( $H_2$ ) variabel literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas APBdes. Dengan demikian, hipotesis 2 yang menyatakan bahwa literasi keuangan berpengaruh terhadap kualitas APBdes diterima. Artinya, Literasi keuangan yang cukup dari hasil membuktikan bahwa pentingnya pengaruh positif terhadap perilaku keuangan seseorang, seperti mengatur atau mengalokasikan keuangannya dengan tepat sangat penting dalam pengetahuan keuangan, pemahaman regulasi keuangan, realisasi dalam program masyarakat dan sadar risiko.

Pengujian hipotesis 3, Hasil uji pengaruhnya secara langsung, sebagai berikut:

**Tabel 3. Pengaruh Pemberdayaan Masyarakat (X3) terhadap Kualitas APBdes (Y)**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.264	.92		2.913	.000
Pemberdayaan Masyarakat (X3)	.597	.115	.472	2.714	.000

Sumber: Data primer data diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat ditentukan model regresi linear sederhana yang dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut:  $Y = 0.264 + 0.472 X_3 + e$

Dari nilai persamaan regresi diatas dapat diketahui bahwa variabel bebas memiliki nilai koefisien regresi yang positif dan besarnya pengaruh pemberdayaan masyarakat sebesar 0,472 atau 47,2% memiliki pengaruh positif terhadap kualitas APBdes. Hal ini menunjukkan bahwa bila variabel bebas tersebut ada yang mengalami perubahan (baik naik atau turun), maka variabel terikatnya juga akan berubah ke arah yang sama (naik atau turun).

Koefisien dari variabel pemberdayaan masyarakat (X3) adalah signifikan pada  $\alpha = 0,05$ , karena karena  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel ( $2.714 > 2.639$ ) atau nilai sig.  $0,02 < 0,05$ . Artinya hipotesis 3 ( $H_3$ ) variabel pemberdayaan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas APBdes. Dengan demikian, hipotesis 3 yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat berpengaruh terhadap kualitas APBdes diterima. Artinya, Pemberdayaan masyarakat hasil penelitian ini, merupakan upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif kepada masyarakat desa.

## 5. Kesimpulan

Partisipasi Anggaran berpengaruh terhadap Kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Gunung Mas. Hasil perhitungan memberikan bukti dari analisis regresi bahwa  $t$  hit  $>$  dari  $t$  tab. Hal ini dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yang artinya bahwa hipotesis yang diajukan diterima. Artinya semakin tinggi Partisipasi Anggaran, maka akan semakin baik Kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Literasi Keuangan berpengaruh terhadap Kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Gunung Mas. Hasil perhitungan memberikan bukti dari analisis regresi bahwa  $t$  hit  $>$  dari  $t$  tab. Hal ini dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yang artinya bahwa hipotesis yang diajukan diterima. Artinya semakin tinggi Literasi Keuangan, maka akan semakin baik Kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pemberdayaan Masyarakat berpengaruh terhadap Kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Gunung Mas. Hasil perhitungan memberikan bukti dari analisis regresi bahwa  $t$  hit  $>$  dari  $t$  tab. Hal ini dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yang artinya bahwa hipotesis yang diajukan diterima. Artinya semakin tinggi Pemberdayaan masyarakat, maka akan semakin baik Kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagi aparat desa di kantor Kecamatan Manuhing, Kecamatan Talaken, Kecamatan Tehang, Kecamatan Rabambang, Kecamatan Tumbang Jutuh, Kecamatan Rahuyan, Kecamatan Tewah dan Kecamatan Marikoi di Kabupaten Gunung Mas, agar lebih memperhatikan variabel Partisipasi Anggaran, Literasi Keuangan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam meningkatkan

Kualitas APBdes. Indikator-indikator yang sudah ada lebih dicermati dan dikembangkan untuk mewujudkan kualitas anggaran pendapatan dan belanja desa lebih terarah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Kabupatæn Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Peneliti selanjutnya dapat memanfaatkan dan mengembangkan hasil penelitian ini dengan menggunakan variabel-variabel lain yang bisa mempengaruhi Kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan aplikasi keuangan sebagai dasar dalam praktis laporan keuangan desa.

## REFERENSI

- Artana, A., Made, I., Erviantono, S., Purnamaningsih, S. H., & Eka, P. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Apbdes) Tahun Anggaran 2012/2013 di Desa Sumerta Kaja, Kecamatan Denpasar Timur. *Citizen Charter*, 1(2), 28604.
- Butarbutar, D. N., Sintani, L., & Harinie, L. T. (2020). Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir melalui pemberdayaan perempuan. *Journal of Environment and Management*, 1(1), 31-39.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan masyarakat: Menggali potensi lokal desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135-143.
- Hanifah, S. I., & Praptoyo, S. (2015). Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja desa (APBDes). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 4(8).
- Hasanah, A. M. (2020). Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 2(2).
- Hidajat, T. (2016). *Literasi Keuangan*. STIE Bank BPD Jateng.
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasutian, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146-154.
- Irfan, M., Santoso, B., & Effendi, L. (2016). Pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran dengan asimetri informasi, penekanan anggaran dan komitmen organisasional sebagai variabel pemoderasi. *Journal of Accounting and Investment*, 17(2), 158-175.
- Iyan, I., Mawung, A. S., & Mantikei, B. (2020). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Mulia di Desa Purwareja Kabupaten Lamandau. *Journal of Environment and Management*, 1(2), 103-111.
- Kisnawati, B., Irianto, I., & Siswandi, H. (2019). PENGENDALIAN INTERN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGURANGI KECENDERUNGAN KECURANGAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH. *Valid: Jurnal Ilmiah*, 16(1), 48-60.
- Mardiyatun, N. M. (2020). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Apbdes Sekecamatan Menganti Gresik* (Doctoral dissertation, Universitas Wijaya Putra).
- Maryani, D., & Nainggolan, R. R. E. (2019). *Pemberdayaan masyarakat*. Deepublish.
- MUHARAM, H., & SUGIONO, S. (2018). *ANALISIS PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN DENGAN STRUKTUR MODAL SEBAGAI INTERVENING (Studi pada Perusahaan Konstruksi dan*



- Properti yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2010–2015* (Doctoral dissertation, UNDIP; Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Prayitno, J. H., Mawung, A. S., & Syamsudin, A. (2020). Pengaruh Kompetensi, Insentif dan Motivasi terhadap Kinerja Pegawai pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah. *Journal of Environment and Management*, 1(2), 91-102.
- Ramadhan, B. (2018, April). Peningkatan Kapasitas Penganggaran, Pemanfaatan, Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (apbdes). In *prosiding seminar hasil pengabdian masyarakat* (Vol. 1, No. 1, pp. 55-60).
- Sabtuti, L., & Kristiana, T. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat disekitar Obyek Wisata Taman Nasional Sebangau Kelurahan Kereng Bangkirai Kota Palangka Raya. *Journal of Environment and Management*, 1(3), 241-252.
- Suartini, S., Sulistiyo, H., & Huda, S. (2020). Determinasi Transparansi APBDes Pada Kabupaten Karawang. *Jurnal Akuntansi: Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 7(1).
- Utomo, S. J. (2015). Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Bandung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto). *Media Trend*, 10(1), 19-31.
- Wigreny, T., & Kristiana, T. (2020). Pengembangan Kawasan Wisata Berbasis Masyarakat di Taman Nasional Sebangau Provinsi Kalimantan Tengah (Studi Kasus di Kelurahan Kereng Bangkirai). *Journal of Environment and Management*, 1(1), 16-22.
- Winaya, I. K., & Yudharta, I. D. (2018). Desa Membangun: Analisis Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017 (Studi Kasus di Desa Kategori Tertinggal Pada Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli). *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana*.